

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN: PP NO. 17 TAHUN 2017

M.Cholifihani,
Sabtu, 26 Juni 2019

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

9 Program Prioritas NAWACITA

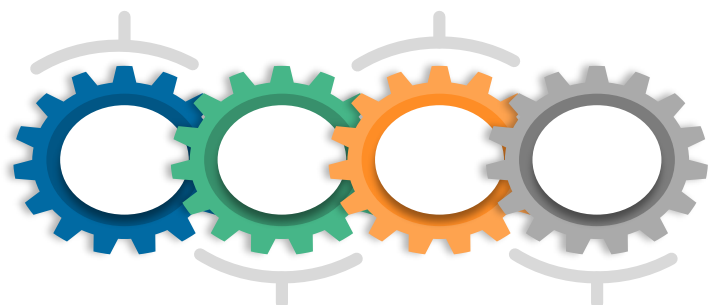


1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial



Memperbaiki
Kualitas Belanja

Peningkatan **Daya Saing** dan
Nilai Tambah industri



Peningkatan **Iklim investasi**

Peningkatan **Peran Swasta**

**Linkage
Prioritas
Nasional di
Daerah**

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Nawacita 5
 • Revolusi Mental
 Nawacita 8 & 9
 • Pendidikan
 • Kesehatan
 • Perumahan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Nawacita 6 & 7
 • Kedaulatan Pangan
 • Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
 • Kemaritiman dan Kelautan
 • Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Nawacita 3
 • Antar Kelompok Pendapatan
 • Antarwilayah : (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

(Nawacita 4)
Kepastian dan Penegakan Hukum

(Nawacita 1)
Keamanan dan Ketertiban

(Nawacita 9)
Politik dan Demokrasi

(Nawacita 2)
Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

RKP 2015*)

Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

RKP 2016

Pembangunan Infrastuktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

RKP 2017

Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesepakatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah

RKP 2018

Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

RKP 2019

Ditentukan dalam Proses Penyusunan RKP 2019

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERENCANAAN



1. Pendekatan Penyusunan (khususnya mulai RKP 2018) dilakukan melalui pendekatan **Money Follow Program**.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif**, dan **Spasial** dengan memperhatikan pada:



Perkuatan
Perencanaan dan
Penggangan



Pengendalian
Perencanaan



berbasis
Kewilayahan

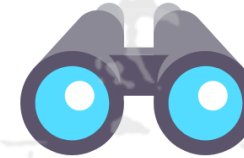


Integrasi Sumber
Pendanaan

PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN



Tematik: fokus perencanaan yang didetailkan Sampai dengan Program Prioritas



Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu → hilir)



Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan



Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari Berbagai kegiatan yang terintegrasi

POKOK PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO 17/2017

Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran



- Disusun hingga proyek prioritas
- Dikendalikan pada agenda pembahasan, dokumen dan pelaksanaan
- Money Follow Program



- Perubahan waktu Perpres RKP
- Pemutakhiran RKP



Dalam Mengkoordinasikan Sistem Informasi dan Perencanaan, Menteri PPN dan Menteri Keuangan:

1. **Berbagi data** (data sharing) perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja;
2. Menyelenggarakan **Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran** yang terintegrasi;
3. Menyusun Format, klasifikasi, dan sistem database Renja-KI dan RKA-KL.



K/L-Non K/L Daerah



Memperjelas peran Bappenas dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan *Resource Envelope*



Bappenas dan Kemenkeu bersama-sama mengalokasikan pagu



PRINSIP SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN PP 17/2017

UU NO.25/2004 SPPN

UU NO.17/2003 KEUANGAN NEGARA

PP NO. 40/2006
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

PP NO. 90/2010
PENYUSUNAN RENCANA KERJA & ANGGARAN K/L (RKA
KL)

JANGKA PANJANG

JANGKA MENENGAH

TAHUNAN

TAHUNAN

FORMAT RKA KL



PP 17 TAHUN 2017 SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah
tetap di PP 40/2006 yang di revisi

CAKUPAN SUBSTANSI PP

Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan
Penggangan
Pembangunan Nasional
Tahunan

Penyusunan RKA KL tetap di PP
90/2010 yang direvisi

Tujuan: Pengendalian Perencanaan Untuk Mencapai Sasaran Prioritas Nasional

TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Desentralisasi fiskal → **peningkatan dana transfer ke daerah** serta pengelolaan yang diberikan kepada daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Desentralisasi politik → pemilihan kepala daerah secara serentak → pemberian sebagian kewenangan pusat kepada daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan.
- Desentralisasi administratif → pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah.